

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan serangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kuat dengan memberdayakan pelaku dan potensi ekonomi suatu daerah tertentu, serta memperhatikan penataan ruang fisik maupun sosial sehingga terjadi pemerataan pertumbuhan ekonomi sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah yang merupakan tujuan bagian dari pembangunan nasional, serta untuk mencapai tingkat pembangunan yang tinggi dan tetap menjaga kestabilan ekonomi. (Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999).

Pembangunan ekonomi daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pelaksanaan pembangunan senantiasa didasarkan pada potensi yang dimiliki suatu daerah. Dalam era kebijakan otonomi daerah, dalam desentralisasi memegang peranan penting dalam mewujudkan keberhasilan otonomi daerah. Desentralisasi sendiri adalah suatu penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada, daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 UU No. 32 Tahun 2004).

Tujuan utama dari kebijakan desentralisasi tahun 1999 adalah untuk membebaskan pemerintah pusat dari beban-beban yang tidak perlu menangani

urusan domestik, dengan itu diharapkan pemerintah pusat lebih mampu berkonsentrasi pada perumusan kebijakan makro nasional yang bersifat strategis. Di lain pihak, daerah otonom akan mengalami proses pemberdayaan yang signifikan (Haris, 2005).

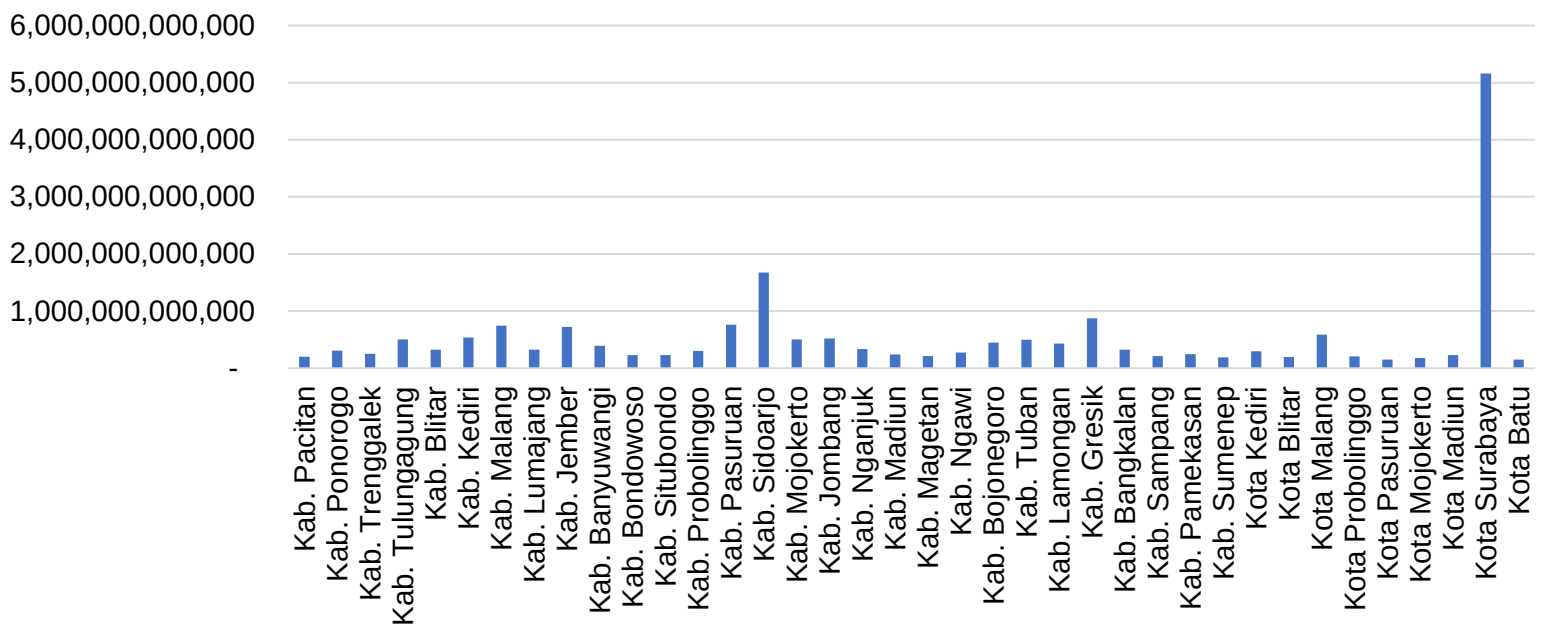
Dalam ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi daerah; Pengaturan dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; serta Pertimbangan Keuangan Pusat dan Daerah berisi satu paket kebijakan tentang otonomi daerah, yaitu : (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, (2) Undang-Undang Nomor 25 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah sebagai pengganti Undang Undang Nomor 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan antara Negara dengan Daerah-Daerah yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri.

Selain itu Ketetapan MPR No. VI/MPR/2002 tentang Rekomendasi atas Laporan Pelaksanaan Putusan MPR RI oleh Presiden, DPA, BPK, dan MA yang merekomendasikan kepada Pemerintah dan DPR agar melakukan perubahan yang sifatnya mendasar dan menyeluruh terhadap Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 diganti dengan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tolok ukur yang penting untuk menentukan tingkat kemampuan suatu daerah dalam melaksanakan otonomi daerah secara nyata dan bertanggung jawab. Otonomi daerah sendiri membawa dampak positif bagi daerah yang memiliki potensi sumber daya alam, tetapi tidak demikian dengan daerah yang miskin sumber daya alamnya, yang merupakan salah satu masalah yang dihadapi pemerintah daerah kabupaten/kota pada umumnya adalah terbatasnya dana yang berasal dari daerah sendiri (PAD), sehingga proses otonomi daerah belum bisa berjalan sebagaimana mestinya (Azis,1997).

Adapun data tentang PAD Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2017 di bawah ini sebagai berikut:

Gambar 1.1 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2017



(Sumber: BPS Jawa Timur diolah, 2017)

Berdasarkan Grafik di atas bisa dilihat 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang paling tinggi sampai dengan yang paling rendah, Pendapatan Asli Daerah dari Paling Tinggi di bandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya yaitu Kota Surabaya dengan jumlah sebesar Rp. 5.161.844.571.172 yang tingginya sangat drastis di bandingkan yang lainnya, dari atas kedua yaitu Kab. Sidoarjo sebesar Rp. 1.671,806,819,697, ketiga yaitu Kab. Gresik sebesar Rp. 871.564,498,248. Sedangkan Pendapatan Asli daerah yang paling rendah pada Kabupaten/kota di Jawa timur yaitu Kota Pasuruan dengan jumlah sebesar Rp. 147.981.423.536, tetapi diatas dari Kota Pasuruan selisihnya tidak terlalu besar yaitu Kota Batu sebesar Rp. 149.423,863,144, Untuk ketiga dari bawah yaitu Kota Mojokerto sebesar Rp. 178.295,062,136. PAD sumber salah satu dalam pembangunan ekonomi suatu daerah tersebut.

Pembangunan ekonomi daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pelaksanaan pembangunan senantiasa didasarkan pada potensi yang dimiliki suatu daerah. Dalam era kebijakan otonomi daerah, desentralisasi memegang peranan penting dalam mewujudkan keberhasilan otonomi daerah. Desentralisasi sendiri adalah suatu penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada, daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 UU No. 32 Tahun 2004).

Pendapatan Asli Daerah adalah suatu penerimaan keuangan semua yang diperoleh dari sumber potensi daerah itu sendiri dan dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Halim (2007:96) menyatakan bahwa

Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Adapun Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga merupakan pendapatan yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lainlain pendapatan asli daerah yang sah, dengan bertujuan untuk memberikan keleluasaan pada pemerintah daerah guna menggali pendanaan dalam melaksanakan otonomi daerah sebagai perwujudan asa desentralisasi.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga merupakan salah satu indikator atau kriteria untuk mengukur ketergantungan suatu daerah terhadap Pemerintah Pusat. Berdasarkan Undang undang No.32 Tahun 2004, sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah didapat dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Meningkatnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah akan memberikan kontribusi yang besar untuk realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal tersebut dikarenakan jumlah Pendapatan Asli Daerah yang besar akan menambah jumlah APBD disisi Pendapatan Daerah. Untuk itu, sangatlah penting bagi suatu daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya.

Indikator Makro ekonomi merupakan suatu analisis dalam perkembangan ekonomi daerah yang dapat digunakan untuk memprediksi perkembangan ekonomi suatu daerah dimasa depan. Dalam hal ini biasanya Pemerintah daerah menggunakan indikator yang mewakili ekonomi makro meliputi: produk domestik

regionala bruto, jumlah penduduk, tingkat pengangguran terbuka dan indeks pembangunan manusia.

Dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terdapat sembilan sektor berdasarkan lapangan usaha. sembilan sektor tersebut yaitu: sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian; sektor industri pengolahan; sektor industri listrik, gas dan air bersih; sektor bangunan; sektor perdagangan, hotel dan restoran; sektor pengangkutan dan komunikasi; sektor keuangan, sewa dan jasa perusahaan; sektor jasa-jasa.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) juga dikelompokkan menjadi tiga kelompok yaitu sektor primer, sektor sekunder dan sektor tersier. Pengelompokkan tersebut didasarkan atas input-output dan awal terjadinya proses produksi. Dari kelompok sektor primer meliputi kegiatan yang outputnya masih merupakan output proses tingkat dasar. yang dimaksudkan sektor primer adalah sektor pertanian dan sektor pertambangan dan penggalian. Sektor yang sebagian besar inputnya berasal dari sektor primer dikelompokkan kedalam sektor sekunder. Kelompok sektor sekunder meliputi sektor industri pengolahan; sektor listrik, gas dan air bersih, dan sektor bangunan. Sedangkan sektor tersier terdiri dari sektor perdagangan, hotel dan peralatan; sektor pengangkutan dan komunikasi; sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan serta sektor jasa-jasa.

Semakin tinggi pada suatu pendapatan perkapita riil suatu daerah, semakin besar pula kemampuan masyarakat daerah tersebut untuk membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan pemerintahnya. Maka dapat dikatakan bahwa semakin tinggi pendapatan perkapita suatu daerah, semakin besar pula potensi

sumber penerimaan daerah tersebut. Sehingga kemampuan masyarakat membayar pajak yang meningkat. Perkembangan PDRB perkapita di Daerah Kabupaten/Kota Se Jawa Timur.

Jumlah penduduk merupakan faktor yang sangat penting sebagai salah satu wajib pajak. Karena pajak sendiri adalah gejala sosial, artinya pajak hanya terdapat dari masyarakat, jika tidak ada masyarakat berarti tidak ada pajak, oleh sebab itu pajak dipungut untuk kepentingan masyarakat itu sendiri dalam pembangunan daerah, karena hubungan antara masyarakat sangat erat sekali. Pajak sendiri didalam masyarakat dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan ekonomi.

Pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja dan tidak mempunyai pekerjaan tetapi sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru, penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (*discouraged workers*) atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja atau mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja (Todaro,2000:307).

Dampak pada pengangguran menyebabkan pendapatan pajak pemerintah berkurang dan kesejahteraan juga terganggu. Pengangguran ini diakibatkan oleh tingkat pertumbuhan ekonomi yang rendah, dan dalam pertumbuhan ekonomi yang rendah pendapatan pajak pemerintah semakin sedikit. Dengan demikian pengangguran yang tinggi mengurangi kemampuan pemerintah dalam menjalankan kegiatan pembangunan. Pengangguran juga akan mempengaruhi kehidupan masyarakat individu dan kestabilan masyarakat.

Menurut Badan Pusat statistik Indeks Pembangunan Manusia merupakan indeks komposit yang digunakan untuk mengukur pencapaian rata-rata suatu negara dalam tiga hal mendasar pada pembangunan manusia, yaitu : (1) Indeks Harapan Hidup, yang diukur dengan angka harapan ketika lahir; (2) Indeks Pendidikan, yang diukur berdasarkan rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas; (3) Indeks Pendapatan, yang diukur dengan daya beli konsumsi per kapita.

Pada penelitian ini belum pernah di teliti oleh siapapun, baik berupa jurnal maupun penelitian skripsi, oleh sebab itu saya mengambil tentang indikator yang mempengaruhi PAD yang meliputi PDRB, jumlah penduduk, tingkat pengangguran terbuka dan indeks pembangunan manusia. Adapun masih banyak indikator ekonomi makro yang dapat menjadi landasan atau dorongan dalam mensejahterahkan masyarakat di daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Dengan adanya penelitian ini menambah pengetahuan dan mengetahui apa dampak yang dapat meningkat atau menurunnya suatu pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat.

Kesejahteraan masyarakat dapat dicapai dengan pembangunan, terutama pembangunan ekonomi baik tingkat nasional maupun daerah. Diberlakukannya Undang-undang Republik Indonesia No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan antara Pusat dan Daerah, pembangunan tidak lagi diawasi secara ketat dari pusat namun sudah diserahkan kepada masing- masing pimpinan Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Pemerintah Daerah diharapkan mampu melaksanakan otonomi daerah tanpa berharap terlalu besar kepada pemerintah pusat karena pembangunan tidak lagi dikendalikan oleh pemerintah pusat tetapi udah diserahkan sepenuhnya kepada Kabupaten/Kota di Jawa Timur seluas-luasnya.

Kabupaten/Kota merupakan kawasan pemukiman yang secara fisik ditunjukkan oleh kumpulan rumah-rumah yang mendominasi tata ruangnya dan memiliki berbagai fasilitas untuk mendukung aktivitas kehidupan masyarakat yaitu sebagai pusat produksi, perdagangan, pemerintahan, sosial dan kebudayaan, sarana olahraga dan lain-lain. Hal ini mengakibatkan perolehan PAD antara Kota dan Kabupaten sangat berbeda, karena jenis potensi pajak dan retribusi yang dapat ditarik oleh pemerintah Kota lebih banyak dibandingkan dengan Kabupaten. Berdasarkan uraian diatas tentang perbedaan perolehan PAD dari beberapa pungutan pajak antara Kota yang lebih berpotensi dari pada Kabupaten, maka studi kasus dalam penelitian ini menggunakan Kota-Kota SeJawa Timur.

Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional secara cukup signifikan, yakni mencapai 14,8% terhadap total perekonomian Indonesia. Dengan ekonomi yang cukup besar tersebut, Jawa Timur juga merupakan pusat perekonomian bagi wilayah timur Indonesia. Jawa Timur sendiri memiliki 38 Kabupaten/Kota yang dapat meningkatkan suatu pertumbuhan ekonomi yang nantinya akan berdampak terhadap Negara Indonesia menjadi lebih baik.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian Latar belakang yang sudah di paparkan, maka dapat ditentukan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh indikator makro terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten atau Kota di Jawa Timur?

1.3 Batasan Masalah

Pembahasan Batasan Masalah dalam penelitian ini bertujuan untuk membatasi suatu pembahasan pada pokok permasalahan penelitian, Ruang lingkup menentukan kosep utama dalam permasalahan sehingga masalah-masalah dalam penelitian ini dapat dimengerti dengan mudah dan baik. Adapun batasan masalah pada penelitian sangat penting dalam mendekatkan pada pokok permasalahan yang akan dibahas. hal ini agar tidak terjadi kesimpangsiuran dalam menginterpretasikan hasil penelitian.

Pada penelitian ini, lebih difokuskan pada beberapa permasalahan yang di mana diberi batasan masalah supaya tidak terlalu meluas terkait apa yang akan dibahas pada penelitian yang dilakukan. Adanya batasan masalah tersebut agar penelitian lebih fokus pada masalah yang akan dikaji yaitu terkait pengaruh indikator makro terhadap penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten atau kota di jawa timur.

1.4 Tujuan Penelitian

Adanya rumusan masalah yang disusun, maka tujuan penelitian pada penelitian yang dilakukan yaitu:

1. Mengetahui pengaruh indikator makro terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten atau Kota di Jawa Timur.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada tujuan penelitian diatas, maka dapat diperoleh dua manfaat yaitu sebagai berikut:

1.5.1 Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini dapat memberikan informasi dalam wacana akademik, mengembangkan wawasan berfikir, yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan khususnya ilmu ekonomi makro mengenai permasalahan yang diteliti sehingga memperoleh gambaran yang jelas mengenai ada tidaknya kesesuaian antar
- b. Bagi ilmu pengetahuan, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dalam menambah wawasan baru mengenai kebijakan pengaruh dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

1.5.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah, dalam pengambilan kebijakan kinerja pertumbuhan ekonomi suatu daerah khususnya indikator makro yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten atau Kota di Jawa Timur, baik dalam rangka mengontrol atau mengevaluasi kebijakan yang sudah dilakukan maupun dalam rangka membuat perencanaan kedepan sehingga penerimaan PAD dapat selalu meningkat agar dapat mensejahterakan masyarakat daerah setempat, yang salah satunya indikator-indikator ekonomi dapat memberikan pengaruh yang positif bagi perkembangan daerah tersebut.
- b. Bagi peneliti selanjutnya, dapat memotivasi peneliti untuk terus melakukan penelitian lebih lanjut, sehingga dapat menghasilkan temuan baru dan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kebijakan pengaruh kinerja ekonomi makro daerah terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten atau Kota di Jawa Timur.

- c. Bagi masyarakat, menjadikan evaluasi dalam membangun suatu daerah menjadi lebih baik, terkait pertumbuhan ekonomi yang kurang stabil yang salah satu sumbernya dari PAD Kabupaten atau Kota di Jawa Timur. Dengan itu akan menjadikan landasan dan dapat membuat PAD selalu meningkat setiap tahunnya.
- d. Bagi pembaca dan mahasiswa Program Studi Ekonomi Pembangunan, penelitian ini akan memberikan dampak yang positif. Sebab, dapat dijadikan acuan atau relevansi untuk mengadakan penelitian selanjutnya. Data yang dihasilkan pada penelitian ini, bisa dijadikan relevansi bagi pelengkap atau penunjang apabila ada penelitian selanjutnya.